

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah interaksi yang dilakukan antara *state*/negara dan *non-state*/bukan negara yang melewati batas-batas negara. Tujuan dari interaksi ini adalah bahwa suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri dan memerlukan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya atau negaranya. Pada hakikatnya, untuk menjelaskan mengapa setiap negara saling berinteraksi adalah pada dasarnya kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menjelaskan apa yang kita inginkan dari sebuah negara, dan setidaknya ada lima dasar nilai yang kita ingin negara melakukannya, yaitu keamanan, kebebasan, memerintah, keadilan dan kesejahteraan (Jackson & Sorensen, 2010: 2).

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subyek teoritis dan praktis atau subyek kebijakan, dan pendekatan akademis yang dapat berupa subyek teoritis dan praktis atau subyek kebijakan, dan pendekatan akademis yang dapat berupa subyek empiris atau normatif atau keduanya. Hubungan internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subyek yang mencakup banyak hal seperti ekonomi internasional, hukum internasional, dan masih banyak lagi. Aspek-aspek yang mencakup tentang hubungan internasional, khususnya perang dan

diplomasi, telah diteliti dan dikomentari setidaknya sejak zaman sejarawan Yunani kuno Thucydides, tetapi hubungan internasional hanya menjadi disiplin akademis yang tepat pada awal abad kedua puluh (Jackson & Sorensen, 2005: 4).

Hubungan Internasional yang mencakup hal tentang interaksi antar Negara–negara tentunya dibutuhkan oleh setiap Negara, seperti pemenuhan kebutuhan suatu Negara, salah satunya dengan melakukan sebuah interaksi yang disebut kerjasama internasional. Hubungan antar Negara yang berupa kerjasama internasional merupakan Hubungan Luar Negeri sebagai interaksi antara dua atau lebih negara yang diwakili untuk melakukan diplomasi, peningkatan ekonomi dan penguatan keamanan dalam mengejar tujuan terciptanya kepentingan bersama (Perwita & Yani, 2005: 33).

Pada tahun 2000-an, ketika muncul aktor-aktor di luar negara lazim dikenal sebagai aktor non-negara sebagai kekuatan yang ikut mempengaruhi politik internasional. Karena adanya pengaruh serta hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka ekonomi dunia pun mengalami perubahan yang sangat drastis dalam dua setengah abad belakangan ini. Salah satu paradigma dalam ekonomi dunia yaitu munculnya kerjasama ekonomi sub regional. Di Asia, *growth area* itu mengambil bentuk: *growth triangle* (segitiga pertumbuhan, STP) dan polygon seperti STP. S. Tumen, Cina Selatan, IMT (Indonesia, Malaysia, Thailand), SIJORI (Singapura, Johor, Riau) – yang kemudian berganti nama menjadi IMS (Indonesia, Malaysia, Singapura) dan BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East Asean Growth Area*) (Sondakh, 2002: 116).

Kemudian Sondakh memaparkan mengenai tujuan dari kerjasama BIMP-EAGA ini, bahwa: BIMP-EAGA dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi komplementaritas dan skala ekonomi sebagai determinan pertumbuhan regional dan daya saing ekonomi sub regional. Bagi Indonesia, BIMP-EAGA tidak hanya penting untuk menjawab tantangan liberalisasi perdagangan tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran (Sondakh, 2002: 120).

Skema kerjasama ekonomi sub regional atau *Growth Area* merupakan strategi empat negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial terutama di daerah-daerah tertinggal di Asia Tenggara, seperti penjelasan Asian Development Bank (ADB) mengenai BIMP-EAGA, bahwa: “Rencana Kerjasama ekonomi Subregional atau area/kawasan pertumbuhan sudah muncul sebagai suatu strategi yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial terutama sekali di area dengan pembangunan yang masih rendah di Asia Tenggara di tahun 1990” (ADB, 2001: 1).

Kemudian landasan utama dibentuknya skema kerjasama BIMP-EAGA adalah untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang wajar di kawasan Asia Tenggara dan juga untuk menopang roda pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penjelasan di bawah ini:

Untuk mempromosikan ekonomi subregional dan aktivitas perdagangan, pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Pilipina di tahun 1994 meluncurkan suatu inisiatif/prakarsa kerjasama ekonomi, BIMP-EAGA. Tujuan BIMP-EAGA yang utama adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai tambah tinggi di sektor agro-industry, pabrikasi berbasis

sumberdaya alam, dan pariwisata berkualitas tinggi (ADB, 2002: 1).

Dalam dinamika Hubungan Internasional perjalanan kehidupan masyarakat internasional yang merupakan satu kesatuan dari beberapa negara yang berdaulat dan merdeka serta sejumlah individu tentu memiliki pola interaksi yang cukup beragam yang berkaitan dengan kepentingan (*interest*) masing-masing negara sehingga menimbulkan sebuah pola interaksi, baik berupa kerjasama dan konflik.

Salah satu bentuk kerjasama sub-regional dalam Hubungan Internasional adalah kerjasama yang bisa jadi mempunyai wilayah yang berdekatan maupun tidak, terkadang kerjasama sub-regional mempunyai daya tarik atau strategi tersendiri yang mempunyai maksud dan tujuan sama.

Kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerjasama dimaksud sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Di dalam kerjasama ekonomi regional ASEAN salah satunya bertujuan untuk mendorong dan mengantisipasi realisasi pasar bebas AFTA yang akan

diberlakukan tahun 2003, telah dikembangkan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR). KESR dibentuk berdasarkan landasan yang bersifat strategis dan sejalan dengan dasar-dasar proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan, yaitu: (1) Kedekatan geografis antar wilayah negara-negara peserta; (2) Komplementaritas faktor produksi antar wilayah/negara; (3) Peran dunia usaha sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi dan; (4) Peran pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator. (http://bangnak.ditjennak.go.id/pdf_file/kesr.html diakses tanggal 25/05/2020).

Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) bertujuan untuk memacu pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya keseluruhan wilayah tanah air, menggalakkan prakarsa dan peran aktif swasta dan masyarakat di daerah dalam pembangunan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, terpadu dan berwawasan lingkungan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan tersebut diatas sejalan dengan tujuan penciptaan *scheme* KESR yang telah disepakati oleh Kepala Negara ASEAN pada KTT V di Bangkok pada tahun 1995. KTT tersebut menghasilkan suatu agenda bagi peningkatan keterpaduan ekonomi ASEAN yang disebut “*Agenda for Greater ASEAN Economic Integration*” yang terdiri dari: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya, (3) Menarik kawasan KESR ke dalam lingkup pertumbuhan perekonomian ASEAN secara keseluruhan. (http://bangnak.ditjennak.go.id/pdf_file/kesr.html diakses tanggal 25/05/2020).

Faktor-faktor yang kondusif untuk pengembangan kerjasama Sub-Regional ASEAN adalah: **Pertama**, adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi diantara ketiga kawasan pertumbuhan di ASEAN. **Kedua**, kesiapan sektor swasta dalam menghadapi persaingan global maupun dalam penyediaan dana investasi. **Ketiga**, adanya ikatan sejarah, budaya, perdagangan yang kuat diantara penduduk di ketiga kawasan pertumbuhan ASEAN. **Empat**, pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN mempunyai keinginan politik yang kuat untuk memacu pertumbuhan ketiga kawasan pertumbuhan ASEAN secara bersama-sama. **Lima**, kawasan pertumbuhan ASEAN penting artinya dalam mengisi kerjasama ekonomi intra ASEAN dan dalam rangka persiapan menuju realisasi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). **Enam**, pesatnya perkembangan struktur produksi di kawasan pertumbuhan ASEAN yang menimbulkan dampak saling menguntungkan di dalam pengembangan usaha di bidang perdagangan, investasi, ketenaga kerjaan, pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur, pengembangan prasarana, konstruksi, pembangunan sumberdaya manusia, alih teknologi dan jasa.

Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas *cluster dan task force*, yaitu : (a) *Cluster on Natural Resources Development*, diketuai oleh Indonesia (b) *Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD)*, diketuai oleh Brunei Darussalam (c) *Cluster on Joint Tourism Development (JTD)*, diketuai Malaysia (d) *Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED)*, diketuai oleh

Filipina. (e) *Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security*, diketuai oleh Filipina.

Salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA adalah *sub-regional connectivity*. Dalam hal ini, *sub-regional connectivity* diharapkan mendukung terwujudnya *regional connectivity* di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam *ASEAN Master Plan on Connectivity*.

BIMP-EAGA memandang penting konektivitas sebagai salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan visi BIMP-EAGA sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di Asia. Terkait hal ini para pemimpin BIMP-EAGA dalam pertemuannya di Hua Hin, 28 Oktober 2011 telah menetapkan BIMP-EAGA *Infrastructure Project Pipeline* (PIP).

Sejak tahun 2007, BIMP-EAGA telah menandatangani beberapa MOU dalam bidang perhubungan. Salah satunya adalah MOU *on Establishing and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages* (EPEISL). Sebagai implementasi MOU yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut, sejak Desember 2009 telah beroperasi *Roll On/Roll Off* (RO-RO) *Passenger Ferry* antara Muara, Brunei Darussalam dan Menumbok, Malaysia. Demikian pula, jasa pelayaran antara Bitung-Tahuna, Indonesia dan Glan, Filipina mulai dilaksanakan sejak Maret 2010. Di masa mendatang RO-RO diharapkan dapat segera melayani rute Muara, Brunei Darussalam--Labuan, Malaysia. Sementara itu, sebagai implementasi MoU *on Cross Border Movement of Commercial Busses and Coaches* sekitar 40, 000

orang dalam kurun waktu Januari-Desember 2009 telah menggunakan jasa bus lintas wilayah BIMP-EGA (Pontianak-Bandar Seri Begawan).

Selain konektivitas dan pariwisata alam, fokus bidang kerja sama BIMP-EAGA adalah ketahanan pangan. BIMP-EAGA saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai *Food Basket Strategic Plan of Action* sebagai upaya untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu pusat lumbung pangan ASEAN dan wilayah lain di Asia.

Sedangkan pihak luar BIMP-EAGA yang selama ini membantu pengembangan kerja sama dimaksud adalah *Asian Development Bank* (ADB) sebagai *development partner* dan *regional adviser*; Jepang dan China sebagai *development partner*; GTZ sebagai *strategic partner*. Selain itu, BIMP-EAGA juga menjalin kerja sama dengan *Northern Territory*, Australia. (https://kemlu.go.id/portal/i/read/151/halaman_list_lainnya/brunei-indonesia-malaysia-philipina-east-asia-growth-area.html diakses tanggal 04/12/2019).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya mendorong pembangunan di daerah terpencil dan perbatasan. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus yang mewakili Menko Perekonomian menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian kegiatan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA).

Dalam acara Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-23 BIMP-EAGA di Serawak, Malaysia dan BIMP-EAGA telah merayakan hari jadi yang ke-25 di tahun 2019 dengan harapan-harapan menjadi tonggak utama dalam sejarah yang sangat

penting untuk BIMP-EAGA dalam meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan setiap negara anggota BIMP-EAGA. Menggaris bawahi perlunya kerja sama yang kuat dan terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dunia yang berjalan cepat dan dinamis. Adapun kerja sama BIMP-EAGA perlu menemukan solusi yang efektif dengan melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah maupun sektor swasta. Fokus pada penerapan berbagai proyek yang berdampak luas pada kawasan pun perlu dilakukan. (<https://www.nusantarav.com/perdagangan/memasuki-usia-25-tahun-bimp-eaga-fokus-pembangunan-daerah-terpencil.html> diakses tanggal 04/12/2019).

Sejak tahun 2014, perhatian pemerintah bergeser ke kawasan timur Indonesia meskipun penggunaan koridor kawasan ekonomi masih diperhitungkan. Kepala Bappenas saat itu menjelaskan bahwa kebijakan yang ditekankan pada 2015 – 2020 adalah kebijakan pengurangan kesenjangan wilayah dengan cara:

1. Mendorong dan mempercepat pusat–pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan pembangunan klaster–klaster industri;
2. Mengoptimalkan investasi pemerintah dan swasta bagi pembangunan klaster–klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal;
3. Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik;

4. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara, serta pasokan energi;
5. Pengembangan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI) di tiap–tiap koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua melalui pengembangan klaster–klaster industri pengolahan sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan tiap–tiap wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja;
6. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi, misalnya dengan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih;
7. Peningkatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
8. *Debottlenecking* peraturan–peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;
9. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha pemberian insentif fiskal dan non–fiskal yang kondusif.

Mengacu pada kebijakan wilayah perbatasan Indonesia, dari sepuluh wilayah perbatasan negara, ada beberapa pulau terluar yang terkait dengan kerja sama subregional yang menjadi fokus pembangunan wilayah. Pulau–pulau terluar

yang masuk dalam kerja sama BIMP-EAGA adalah Pulau Sebatik, Karang Unarang, Maratua, Sambit, Lingayan, Solando, Dolangan, Bongkil, Mantehage, Makelahi, Kawaluso, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakorotan, dan Kabaruan.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama subregional BIMP-EAGA, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi. **Pertama**, penelitian Lingga Acyuta Putra dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, yang berjudul Peran BIMP-EAGA dalam Mendorong Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 pada tahun 2015. Peneliti yang bersangkutan membahas dan meneliti tentang Peran BIMP-EAGA dalam Mendorong Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana peran BIMP-EAGA dalam membantu dan memberi dorongan dalam terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Masalah yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi tersebut adalah; Bagaimana pemerataan ekonomi di ASEAN, sedangkan beberapa negara ASEAN lainnya dikatakan belum mampu atau belum sanggup mengikuti peraturan dari MEA tersebut. Maka dari itu peran BIMP-EAGA sangat membantu sekali dalam pemerataan atau menyetarakan ekonomi ASEAN yang belum mampu mengikuti MEA.

Kedua, dari penelitian Eri Wibowo Suryapraja, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan-Bandung, yang berjudul Pengaruh Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – *EAST ASEAN GROWTH AREA* (BIMP-EAGA) Terhadap

Pembangunan Daerah Pinggiran Indonesia pada tahun 2018. Peneliti yang bersangkutan meneliti tentang peranan Pengaruh Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – *EAST ASEAN GROWTH AREA* (BIMP-EAGA) Terhadap Pembangunan Daerah Pinggiran Indonesia pada tahun 2018 pada tahun 2006. Adapun tujuan penelitian penelitiannya adalah; Untuk mengetahui pengaruh BIMP-EAGA terhadap ekonomi di Indonesia, Untuk mengetahui berbagai kendala BIMP-EAGA yang dihadapi oleh Kawasan Timur Indonesia, dan untuk mengetahui hasil dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Ketiga, dari penelitian Devy Putri Kussanti, dari Staff Pengajar Akademi Komunikasi, Bina Sarana Informatika-Jakarta Timur, jurnal yang berjudul Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA Di Bidang Ekowisata: Perspektif Indonesia. Peneliti yang bersangkutan, meneliti dan membahas tentang peranan BIMP-EAGA dalam bidang ekowisata di Indonesia. Adapun masalah yang peneliti angkata adalah: Apa saja yang dilakuka BIMP-EAGA dalam pengembangan ekowisata di Indonesia, kendala apa saja yang ditemui BIMP-EAGA dalam pembangunan ekowisata di Indonesia, dan bagaimana hasil BIMP-EAGA dalam pembangunan ekowisata di Indonesia.

Perbedaan peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah peneliti akan meneliti tentang kerjasama subregional BIMP-EAGA dari tahun 2015-2020. Dalam penelitian juga peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang apa saja upaya-upaya yang dilakukan BIMP-EAGA dalam kerjasama subregional dari tahun 2015-2020 dengan judul skripsi: **“Kerjasama Ekonomi Subregional *Brunei***

Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Tahun 2015-2020”.

Peneliti ada ketertarikan dalam meneliti dan mengangkat isu tersebut dikarenakan didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Regionalisme*, adalah berasal dari kata ‘*regional*’ ditambah ‘*isme*’.

Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan *regional* merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka *regionalisme* dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama *regional*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *regionalisme* adalah paham atau kecenderungan untuk mengadakan kerja sama yang erat antarnegara dalam satu kawasan. Contohnya seperti organisasi *regional* seperti ASEAN di lingkup wilayah Asia Tenggara.

Adapun menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan *region* internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa *regionalisme* merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi *region*. Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa *regionalisme* dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan

fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya. Salah satunya *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA), yang menjadi salah satu aktor dalam Regionalisme.

Dalam matakuliah regionalisme akan mempelajari bagaimana bentuk kerjasama dari negara-negara yang berdekatan secara geografis. Wujudnya bisa dalam bentuk organisasi regional. Dalam analisisnya secara mendalam, regionalisme lebih melihat pada proses-proses yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama regional tersebut. Daya ikat apa yang pada akhirnya menyatukan negara-negara dalam suatu wadah kerjasama regional.

2. Organisasi Internasional, adalah mata kuliah yang mengkaji tentang mengenai aktor-aktor yang berupa organisasi lintas negara yang bersifat internasional, dalam mata kuliah ini peneliti mengenal *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan aktor yang terlibat dalam pembentukan *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA).
3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, yakni mengkaji mengenai perkembangan dan situasi politik di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya adalah negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines.

1.1.1 Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan penelitian begitu luas dan kompleks, penulis membatasi permasalahan agar tidak keluar dari topik yang dibahas, yaitu lebih difokuskan terhadap pelaksanaan kerjasama ekonomi subregional *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi di masing – masing negara anggota. Negara anggota di sini adalah merupakan negara – negara yang masuk dalam lingkup anggota BIMP-EAGA, dimana peningkatan ekonomi menjadi fokus utama dari penelitian ini yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi; peningkatan ekonomi dan kendala dalam BIMP-EAGA itu sendiri, periode tahun 2015-2020.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut: **Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi Subregional Antar Negara – Negara (BIMP-EAGA) *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* Pada Tahun 2015-2020?**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja kesepakatan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dilakukan oleh Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) tahun 2015-2020?
2. Apa saja kendala dalam kerjasama ekonomi subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) pada tahun 2015-2020?
3. Bagaimana hasil kerjasama antara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) dalam meningkatkan ekonomi di masing-masing negara anggota?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan apa dari kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* dalam meningkatkan ekonomi dari masing-masing negara anggota.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kesepakatan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dilakukan oleh Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui kendala dalam kerjasama ekonomi subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) pada tahun 2015-2020.

3. Untuk mengetahui hasil kerjasama antara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area* (BIMP-EAGA) dalam meningkatkan ekonomi di masing-masing negara anggota

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan tambahan pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Ekonomi Internasional dan Kerjasama Internasional serta memahami sejauh mana kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area*.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna bagi penulis dan para pembaca penelitian ini.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jauh mengenai Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East Asean Growth Area*.